



Partisipasi Perempuan Indonesia dalam Ekonomi Kreatif untuk Mewujudkan *Sustainable Development Goals*

Idrina Nur Khairunnisa, Ika Riswanti Putranti, Marten Hanura

Departemen Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The participation of women in the development process is important in achieving the targets of the Sustainable Development Goals (SDGs). Through their participation, women can support the success of the SDGs as well as encourage a country's economic growth. The creative economy is a sector that the Indonesian government has chosen to increase women's participation. Although the Government has succeeded in making women the main actors in the creative economy, in fact, the efforts made by the Government are not enough because women are still faced a number of vulnerabilities. With this background, this research is aimed to discuss why women's participation in the creative economy in Indonesia has not been maximized to achieve the SDGs through the Gender and Development framework. Furthermore, this research will also look at the fulfillment of the practical needs and strategic interests of women who participate in the creative economy. This research uses a qualitative method with sources obtained from literature studies and interviews. Based on the research that has been done, it was found that the main causes that women's participation has not been maximized to achieve the SDGs through the creative economy are the social construction of gender and the unfulfilled practical needs and strategic interests of women.

Keywords : *Creative Economy, Women's Participation, SDGs, Vulnerabilities*

PENDAHULUAN

Dibentuknya agenda pembangunan berkelanjutan atau yang biasa dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2015 memiliki tujuan untuk menciptakan perdamaian bagi seluruh masyarakat di dunia. Namun, kesuksesan SDGs tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya partisipasi dalam pelaksanaannya. Partisipasi merupakan proses dimana individu maupun masyarakat turut berperan dalam pengambilan keputusan yang mana keputusan ini nantinya akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka (Claridge, 2004).

Partisipasi yang cukup menjadi perhatian dalam pembangunan adalah partisipasi perempuan. Dilihat sebagai agen strategis pembangunan, partisipasi perempuan dianggap akan dapat menunjang kesuksesan SDGs. Pertama, partisipasi perempuan membantu mewujudkan kesetaraan gender. Tanpa partisipasi, kesetaraan gender tidak akan terwujud dan proses pembangunan menjadi terhambat. Sadar akan pentingnya partisipasi perempuan bagi kesetaraan gender, partisipasi perempuan kemudian dijadikan sebagai salah satu target dari SDGs No.5 Kesetaraan Gender. Selanjutnya,

partisipasi perempuan di bidang ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi partisipasi perempuan, semakin besar dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut laporan dari *McKinsey Global Institute*, partisipasi perempuan yang setara dengan laki-laki akan dapat meningkatkan PDB Global sebesar 26% pada tahun 2025 (Lemmon & Vogelstein, 2017).

Indonesia adalah sebuah negara yang mulai memasuki kondisi bonus demografi dimana 70,72% dari 270.203.917 juta penduduknya merupakan kelompok produktif yang berusia 15-64 tahun (Badan Pusat Statistik, 2020). Bonus demografi yang dimanfaatkan dengan baik, akan memberikan keuntungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Hayes & Setyonaluri, 2015). Bahkan, keuntungan tersebut dapat berlipat ganda ketika partisipasi perempuan sebagai angkatan kerja dapat dimaksimalkan. *Council on Foreign Relations* (CFR) memperkirakan bahwa PDB Indonesia akan mengalami peningkatan sebesar 35% atau sekitar 537 juta USD di tahun 2025 dengan partisipasi perempuan yang setara dengan partisipasi laki-laki (CFR, 2021).

Untuk meningkatkan partisipasi perempuan, yang perlu dilakukan Indonesia adalah menciptakan peluang. Dalam hal ini, Indonesia memutuskan untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Dengan 17 subsektor yang dimilikinya, ekonomi kreatif diharapkan dapat menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat Indonesia, khususnya perempuan, untuk berpartisipasi secara aktif didalamnya (Kemenparekraf, 2020b). Melalui upayanya, Pemerintah Indonesia berhasil menjadikan perempuan menjadi pemeran utama dalam ekonomi kreatif dengan angka partisipasi perempuan sebesar 56,62% (Kemenparekraf, 2020b). Tidak hanya menyediakan peluang bagi partisipasi perempuan, ekonomi kreatif juga menyokong PDB Indonesia sebesar 7,44% atau setara dengan 922,59 triliun rupiah (Perempuan Indonesia Mendominasi Industri Ekonomi Kreatif, 2018).

Meski telah berhasil meningkatkan angka partisipasi perempuan, nyatanya perjalanan Indonesia masih cukup panjang. Pemerintah Indonesia masih belum dapat memaksimalkan partisipasi perempuan di bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan perempuan dihadapkan dengan budaya patriarki yang menyebabkan perempuan rentan terhadap subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban ganda (Susanto, 2016). Akibatnya, Indonesia menempati peringkat ke 99 dari 156 dengan nilai 0,647 untuk subindeks Partisipasi dan Peluang Ekonomi dalam Laporan *Global Gender Gap Index* tahun 2021 (World Economic Forum, 2021). Rendahnya nilai ini menggambarkan bahwa kesenjangan gender dalam bidang ekonomi di Indonesia masih tergolong tinggi. Menurut UN Women, agar partisipasi perempuan dalam ekonomi kreatif dapat ditingkatkan dengan maksimal, maka partisipasi harus disertai pula dengan pemberdayaan perempuan yang sesuai dengan *Women's Empowerment Principles* (WEPs). Pemberdayaan perempuan sangat penting bagi partisipasi karena perempuan akan dapat hidup dalam versi terbaik diri mereka dan juga dengan potensi diri yang maksimal melalui pemberdayaan.

Terdapat beberapa penelitian mengenai pemberdayaan perempuan dan ekonomi. Pertama, penelitian berjudul "*Tackling Poverty through Women Empowerment: The Role of Social Capital in Indonesian Women's Cooperative*" oleh Endah Widiyanti, Pudjihardjo dan Putu Mahardika Adi Saputra yang membahas mengenai pemberantasan kemiskinan melalui pemberdayaan perempuan. Kedua, penelitian berjudul "*Fixing women or fixing the world? 'Smart economics', efficiency approaches, and gender equality in development*" oleh Sylvia Chant dan Caroline Sweetman yang membahas

mengenai partisipasi perempuan dalam ekonomi pintar untuk mewujudkan pembangunan. Ketiga, penelitian berjudul “*The relationship between women entrepreneurship and gender equality*” oleh Leyla Sarfaraz, Nezameddin Faghieh dan Armaghan Asadi Majd yang membahas mengenai hubungan antara kesetaraan gender dan kewirausahaan perempuan untuk mencapai pembangunan ekonomi. Terakhir, penelitian berjudul “*Women Empowerment And Sustainable Development*” yang ditulis oleh Maherukh Khan and Shabana Mazhar yang membahas mengenai pemberdayaan perempuan sebagai kunci untuk pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Menimbang berbagai penelitian terdahulu, penelitian ini berupaya memahami lebih lanjut mengapa partisipasi perempuan dalam ekonomi kreatif masih belum maksimal dalam mewujudkan SDGS yang sesuai dengan target global dengan menggunakan teori *Gender and Development* (GAD) yang memiliki asumsi bahwa kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki merupakan penyebab pembangunan yang adil menjadi terhambat. Melihat lebih dalam mengenai kesenjangan gender, GAD menggunakan dua pendekatan, yaitu dengan meneliti kondisi material perempuan, posisi kelas, dan struktur patriarki; dan (2) melalui pemikiran akan subordinasi perempuan (Parpart et al., 2000). Selain itu, GAD juga melihat kesenjangan gender melalui relasi gender yang muncul akibat konstruksi sosial terhadap gender. Untuk solusinya, GAD berpendapat bahwa kebutuhan praktis dan kepentingan strategis harus dipenuhi secara maksimal untuk mengatasi kesenjangan gender.

PEMBAHASAN

Partisipasi perempuan memiliki peran penting bagi keberlangsungan pembangunan itu sendiri. Melalui partisipasinya, perempuan akan dapat membantu mewujudkan kesetaraan gender sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, partisipasi perempuan kemudian dijadikan sebagai salah satu target yang ingin dicapai SDGs No.5 berikut.

“Target 5.5 : Ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in political, economic and public life” (United Nations, 2021)

Target 5.5 tersebut memperlihatkan partisipasi perempuan tidak hanya diupayakan di bidang politik dan publik, tetapi juga di bidang ekonomi. Pada pelaksanaannya, *Sustainable Development Report* menyatakan bahwa partisipasi perempuan akan dapat mewujudkan SDGs No.5 Kesetaraan Gender jika tingkat partisipasi antara perempuan dan laki-laki mencapai angka 100. Dalam hal ini, Indonesia baru bisa mencapai angka sebesar 65,5 (Sachs et al., 2021). Rendahnya angka capaian Indonesia ini dapat disebabkan oleh adanya kesenjangan gender dalam partisipasi perempuan. Berdasarkan laporan *Global Gender Gap Index 2021*, Indonesia berada diperingkat ke-99 dengan nilai rata-rata sebesar 0,647 dalam subindeks partisipasi dan peluang ekonomi (World Economic Forum, 2021).

Partisipasi Perempuan dalam Ekonomi Kreatif

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 270.203.917 juta jiwa dengan 136.661.899 penduduk laki-laki dan 133.542.018 penduduk perempuan (Badan Pusat Statistik, 2020). Dari jumlah tersebut tersebut, hanya sebagian kecil perempuan yang menjadi angkatan kerja. Hal ini dapat dilihat melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang menunjukkan kesenjangan

partisipasi dimana pada tahun 2019 perempuan memiliki angka capaian TPAK sebesar 51,81 dan laki-laki memiliki angka capaian TPAK sebesar 83,13 (Kemenpppa, 2020c). Indikator-indikator yang dimiliki oleh Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pun juga menunjukkan capaian yang masih berada di bawah angka 50 sehingga pemerintah masih harus bekerja keras dan melakukan upaya lanjutan untuk memaksimalkan partisipasi perempuan Indonesia, baik di bidang ekonomi maupun politik (Kemenpppa, 2020a).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan partisipasi perempuan, khususnya di bidang ekonomi, adalah dengan mengembangkan ekonomi kreatif. Dipilihnya ekonomi kreatif dikarenakan sektor ini menekankan pada sumber daya manusia yang sifatnya tak terbatas seperti kreativitas, teknologi dan juga budaya. Belum lagi dengan 17 subsektor yang dimilikinya, tentunya ekonomi kreatif akan memberikan banyak peluang bagi Indonesia, baik peluang untuk partisipasi perempuan maupun perekonomian (Kemenparekraf, 2020b).

Dalam tindak lanjutnya untuk meningkatkan partisipasi perempuan sebagai pelaku ekonomi kreatif, Pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya seperti mengadakan serangkaian program untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas perempuan, memberikan akses terhadap pembiayaan modal, dan menjalin kerjasama dengan perusahaan mitra (Kemenparekraf, 2020a). Segala upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia ini kemudian berhasil memberikan dampak positif terhadap PDB ekonomi kreatif. Tidak hanya itu, angka tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif turut meningkat secara positif, khususnya tenaga kerja perempuan (Kemenparekraf, 2020a). Angka tenaga kerja ini merupakan perhitungan antara tenaga kerja laki-laki sebesar 43,48% dan perempuan sebesar 56,62%. Tingginya daya serap tersebut menjadikan perempuan sebagai pemeran utama dalam ekonomi kreatif (Kemenparekraf, 2020b).

Angka partisipasi perempuan dalam ekonomi kreatif sangat berbanding terbalik dengan partisipasi perempuan secara umum yang angka partisipasinya hanya sebesar 37,16% dan angka partisipasi laki-lakinya sebesar 62,84%. Perbandingan ini menunjukkan bahwa tingginya angka partisipasi angkatan kerja perempuan hanya terjadi di sektor ekonomi kreatif, sedangkan untuk secara umum tingkat angkatan kerja masih didominasi oleh laki-laki (Sirclo, 2020). Terdapat dua alasan yang menyebabkan perempuan mendominasi sektor ekonomi kreatif. Pertama, perempuan berpartisipasi dalam ekonomi kreatif karena mereka ingin membantu memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Kedua, perempuan berpartisipasi dalam ekonomi kreatif karena mereka melihat adanya ketersediaan peluang untuk menjalankan sebuah usaha (Rahmadani, 2022).

Meski telah berhasil meningkatkan partisipasi perempuan dalam ekonomi kreatif, namun upaya Pemerintah Indonesia tidak berhenti sampai disini. Masih diperlukan upaya-upaya lainnya karena selama partisipasinya, perempuan dihadapkan pada berbagai kerentanan seperti terbatasnya akses untuk meningkatkan kapasitas diri, kesenjangan upah, terbatasnya akses digital, dan sulitnya akses modal untuk mengembangkan usaha. Selama kerentanan ini masih terus membayangi perempuan, maka selama itu pula partisipasi perempuan dalam ekonomi kreatif masih belum dapat maksimal untuk mewujudkan SDGs.

Faktor Penghambat Partisipasi Perempuan Dalam Ekonomi Kreatif Untuk Mewujudkan SDGs

Menurut GAD, terdapat dua faktor yang menyebabkan partisipasi perempuan dalam ekonomi kreatif untuk mewujudkan SDGs menjadi terhambat. Pertama, adanya konstruksi sosial terhadap gender pada perempuan dan laki-laki oleh masyarakat. Adapun pengertian gender, yaitu seperangkat norma, perilaku, dan peran yang membedakan sifat, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan yang dibentuk oleh gender ini menggambarkan struktur patriarki yang menempatkan perempuan diposisi subordinat. Maka dari itu, GAD akan melihat permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan struktur patriarki.

Pada mulanya, patriarki digunakan sebagai sebutan lain dari “aturan ayah” atau kekuasaan yang dimiliki oleh laki-laki terhadap istri, anak, dan harta. Namun, seiring berjalannya waktu, patriarki justru bergeser menjadi suatu sistem yang menindas dan mengeksploitasi perempuan (Parpart et al., 2000). Melihat dari struktur patriarki, GAD menemukan bahwa peran gender akibat konstruksi sosial memunculkan ekspektasi tertentu mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Pada pembagian perannya, laki-laki dipandang sebagai sosok yang kuat, rasional, tegas dan memiliki otoritas sehingga laki-laki memiliki peran untuk urusan publik seperti pencari nafkah dan pengambil keputusan. Sedangkan perempuan dipandang sebagai sosok yang emosional, lemah lembut, rapi, teliti dan keibuan sehingga peran perempuan adalah untuk urusan domestik rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan mengurus anak. (Palulungan et al., 2020). Jika perempuan memutuskan bekerja pun, maka pekerjaan mereka hanya dianggap sebagai nafkah tambahan untuk laki-laki. Melalui perbedaan tersebut, seringkali peran gender mengarah pada kondisi ketidakadilan gender dimana laki-laki berada diposisi dominan, sedangkan perempuan diposisi subordinat.

Di Indonesia, patriarki tidak hanya dianggap sebagai sebuah struktur, melainkan sebagai sebuah budaya yang telah melekat di berbagai aspek kehidupan masyarakat (Kemenpppa, 2020b). Dengan kata lain, kondisi dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Melalui pengaruhnya pula, patriarki menghambat upaya Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan SDGs. Kementerian PPN/Bappenas melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyatakan bahwa:

“Masih terdapat tantangan yang menyebabkan keterbatasan keterlibatan perempuan pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat. Hal ini mengakar pada budaya yang berlaku di masyarakat menciptakan hambatan dari sisi individu perempuan, dan hambatan dari sisi lingkungan yang tidak mendukung partisipasi perempuan sebagai pengambil keputusan.” (Bappenas, 2022)

Keterbatasan untuk terlibat yang dihadapi perempuan menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia mengalami subordinasi atau penempatan perempuan sebagai manusia kelas dua, yakni perempuan lebih rendah dari laki-laki (Sultana, 2010). Dengan kondisi tersebut, pekerjaan perempuan menjadi terbatas hanya pada pekerjaan domestik karena perempuan seringkali diremehkan dan dinomorduakan ketika bekerja.

Pada ekonomi kreatif, tidak menutup fakta bahwa sebanyak 56,62% tenaga kerja perempuan yang mendominasi sektor ekonomi kreatif terbebas dari subordinasi. Bentuk pertama subordinasi perempuan dalam ekonomi kreatif dapat dilihat melalui data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa mayoritas perempuan dalam ekonomi

kreatif bekerja di kegiatan informal, sedangkan laki-laki mayoritas bekerja di kegiatan formal. Kegiatan informal dan formal memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan ini dapat dilihat melalui status pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang ketika ia bekerja dalam suatu unit usaha/kegiatan. Jika seseorang bekerja dengan status pekerjaannya sebagai Berusaha dibantu oleh buruh tetap/buruh dibayar dan sebagai buruh/karyawan/pegawai seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka orang tersebut berkerja dalam kegiatan formal. Namun, jika seseorang bekerja dengan status pekerjaan yang Berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar) seperti pemilik usaha usaha mikro kecil, maka orang tersebut bekerja dalam kegiatan informal. Selain itu, perbedaan lain yang dimiliki oleh kedua kegiatan ini adalah kegiatan formal memiliki perlindungan hukum, kontrak kerja yang jelas, dan upah yang stabil. Sedangkan pekerja di kegiatan informal tidak memiliki perlindungan hukum karena mereka bekerja hanya berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak memiliki kontrak kerja (Badan Ekonomi Kreatif & Badan Pusat Statistik, 2017a).

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan informal memiliki lebih banyak risiko. Meski demikian, masih banyak perempuan yang memilih untuk bekerja di kegiatan informal tidak lain karena pengaruh dari budaya patriarki seperti adanya persepsi terkait peran domestik perempuan, peran ganda perempuan, dan rendahnya tingkat pendidikan perempuan (Widoyono et al., 2016). ILO juga menyatakan bahwa sebagian besar perempuan yang bekerja di kegiatan informal bukan karena murni pilihan mereka, tetapi karena mereka tidak memiliki mata pencaharian lainnya (Bonnet et al., 2019).

Subordinasi selanjutnya dapat dilihat melalui jenis pekerjaan yang dimiliki oleh perempuan dalam ekonomi kreatif. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa laki-laki dalam ekonomi kreatif cenderung bekerja dengan jenis pekerjaan antara lain Tenaga Profesional, Teknisi dan Tenaga Lain Yang Berhubungan Dengan Itu dan Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan. Di sisi lain, perempuan dalam ekonomi kreatif bekerja dengan jenis pekerjaan Pejabat, Pelaksana, Tenaga Tata Usaha dan Tenaga Yang Berhubungan Dengan Itu; Tenaga Usaha Penjualan; Tenaga Usaha Jasa; dan Tenaga Produksi Operator Alat Angkutan Dan Pekerja Kasar (Badan Ekonomi Kreatif & Badan Pusat Statistik, 2017a). Terlihat bahwa meski perempuan menguasai banyak jenis pekerjaan dalam ekonomi kreatif, namun yang bekerja sebagai tenaga profesional dan tenaga kepemimpinan tetaplah laki-laki. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pengaruh budaya patriarki dimana laki-laki dianggap memiliki kemampuan yang lebih baik dengan karakternya yang kuat, rasional dan tegas. Sedangkan perempuan dalam ekonomi kreatif seringkali dianggap sebagai sosok yang emosional, lemah lembut, rapi, dan teliti sehingga perempuan hanya dapat menempati posisi sebagai tenaga kerja saja, alih-alih menjadi seorang pemimpin atau tenaga profesional.

Yang ketiga, subordinasi perempuan dalam ekonomi kreatif ditunjukkan dengan adanya kesenjangan upah dimana upah perempuan lebih rendah dibandingkan upah laki-laki. Di setiap tahunnya, laki-laki dalam ekonomi kreatif selalu memiliki upah yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, yaitu laki-laki sekitar Rp.2.281.582 dan perempuan sekitar Rp.1.818.698. Laporan dari Bekraf juga menunjukkan bahwa upah yang didapat perempuan tersebut juga lebih rendah dari rata-rata upah di sektor ekonomi kreatif sebesar Rp.2.059.899. Adapun kesenjangan upah ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pekerjaan laki-laki lebih berisiko dari perempuan, laki-laki dianggap

lebih produktif dari perempuan, dan kapasitas diri laki-laki yang lebih baik dari perempuan (Badan Ekonomi Kreatif & Badan Pusat Statistik, 2017b).

Kemudian untuk faktor kedua yang menghambat partisipasi perempuan dalam ekonomi kreatif untuk mewujudkan SDGs menjadi terhambat dapat dilihat melalui pemenuhan akan kebutuhan praktis dan kepentingan strategis perempuan. Kebutuhan praktis adalah kebutuhan mendesak yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari perempuan seperti tempat tinggal, makanan, pendapatan, pendidikan, anak-anak, kesehatan dan keamanan (Parpart et al., 2000). Dalam konteks ekonomi kreatif, terdapat dua kebutuhan praktis yang akan dijelaskan pada penelitian ini, yaitu pendidikan dan pendapatan perempuan.

Pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mendapatkan dan mengembangkan kualitas diri mereka, yakni pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula kualitas diri mereka. Sebaliknya, semakin rendah pendidikan seseorang, semakin rendah pula kualitas diri mereka. Rendahnya pendidikan ini akan mengakibatkan akses seseorang terhadap pekerjaan menjadi terbatas. Walaupun dapat bekerja, upah yang didapat pun tidak akan seberapa. Tingkat pendidikan dalam ekonomi kreatif terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu SMP ke bawah, SMA sederajat, dan Diploma ke atas (Badan Ekonomi Kreatif & Badan Pusat Statistik, 2017a). Dari ketiga tingkatan tersebut, sebagian besar tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pekerja ekonomi kreatif, baik perempuan maupun laki-laki, adalah SMP ke bawah. Dibandingkan dengan laki-laki, perempuan pekerja ekonomi kreatif yang berpendidikan SMP ke bawah sebesar 62,82 lebih banyak dari yang berpendidikan Diploma ke atas sebesar 5,66. Maka dari itu, pendidikan untuk perempuan di sektor ekonomi kreatif perlu ditingkatkan dengan maksimal karena pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi individu untuk meningkatkan kualitas diri mereka, khususnya di sektor ekonomi kreatif yang selalu membutuhkan inovasi.

Kebutuhan praktis lainnya yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDGs adalah perempuan memiliki pendapatan atau upah yang rendah. Ketika seorang perempuan ingin memiliki pendapatan, maka yang harus dilakukan adalah mencari pekerjaan. Sayangnya, mendapat pekerjaan tidaklah mudah karena perempuan memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya. Oleh karena itu, perempuan memuskan untuk menjadi setengah penganggur atau bekerja dengan durasi jam kerja di bawah jam kerja normal atau dibawah 35 jam seminggu. Tingginya angka setengah penganggur perempuan dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu : (1) terbatasnya pilihan pekerjaan karena rendahnya pendidikan perempuan; (2) perempuan bertanggung jawab atas urusan rumah tangganya sehingga perempuan harus mengurangi jam kerja mereka; (3) adanya pembagian peran dan kedudukan atas perempuan (Widoyono et al., 2016). Pada kebutuhan praktis, dapat dikatakan bahwa kebutuhan praktis perempuan, baik dari sisi pendidikan maupun pendapatan, masih belum terpenuhi sepenuhnya.

Lain halnya dengan kebutuhan praktis yang berfokus pada kebutuhan hidup perempuan, Kepentingan strategis merupakan kepentingan yang mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan posisi atau status perempuan yang mengalami subordinasi agar setara dengan laki-laki. Dalam menentukan langkahnya, kepentingan strategis akan berfokus pada dua langkah, yaitu pemberdayaan perempuan dan langkah yang dapat memberikan perubahan sosial jangka panjang terhadap sikap dan perilaku laki-laki (Parpart et al., 2000).

Untuk langkah pemberdayaan perempuan, Pemerintah Indonesia mengadakan berbagai macam program pelatihan seperti pelatihan kewirausahaan, pelatihan pemasaran produk, dan pelatihan digital, serta memberikan bantuan modal melalui Bantuan Intensif Pemerintah, Temu Bisnis Perbankan Konvensional dan Syariah, KreatIPO, dan lainnya. Namun, pemberdayaan di sini masih belum maksimal dan masih perlu diupayakan. Belum maksimal di sini bukan berarti pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah masih sangat kurang, namun hanya perlu diupayakan lebih lanjut lagi. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan pemberdayaan perempuan dikatakan belum maksimal.

Pertama, belum semua provinsi di Indonesia telah mencapai angka IDG yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 73,24 (Kemendpp, 2020a). Meski tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap angka capaian IDG, hanya 11 provinsi yang berhasil melampaui target IDG sebesar 73,24, yaitu Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, DI Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur (Gambar 3.4). Sedangkan untuk 23 provinsi sisanya, angka IDG yang dicapai masih di bawah target yang telah ditetapkan sehingga diperlukan upaya pemberdayaan perempuan lanjutan untuk meningkatkan angka IDG di provinsi tersebut.

Kedua, pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh pemerintah belum sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan yang ada di dalam *Women's Empowerment Principles* (WEPs). Kemendpp menyatakan bahwa:

“Karena tidak memiliki program/kegiatan khusus pemberdayaan perempuan, maka Kemendpp/Baparekraf tidak melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan dimaksud” (Kemendpp, 2022)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Kemendpp belum menerapkan WEPs dalam program pemberdayaannya. Bahkan, Kemendpp sendiri belum memiliki program pemberdayaan yang khusus ditujukan untuk perempuan sehingga perempuan yang turut berpartisipasi ekonomi kreatif masih belum mencapai potensi diri mereka yang maksimal dan masih mengalami perlakuan tidak adil atau subordinasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu kesenjangan upah, pendidikan yang rendah, akses pekerjaan dan jabatan yang terbatas, dan lainnya. Walau Kemendpp belum menerapkan WEPs, namun sejumlah perusahaan telah mengadopsi WEPs untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan seperti L'Oréal Indonesia, The Body Shop Indonesia, Gojek, dan *Liberty Society* (UN Women, 2021).

Ketiga, masih adanya pengaruh budaya patriarki membuat upaya pemberdayaan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk merekonstruksi sistem sosial dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender (Kemendpp, 2020b). Budaya patriarki ini juga berpengaruh pada keterbatasan waktu yang dimiliki perempuan untuk mengikuti program pemberdayaan karena memiliki kewajiban untuk mengurus anak-anak dan rumah tangganya. Akibat dari kendala-kendala tersebut, hanya sebagian kecil perempuan dalam ekonomi kreatif yang telah mengikuti program pemberdayaan dan mendapat pembekalan khusus untuk meningkatkan kapasitas.

Sedangkan untuk langkah perubahan sosial jangka panjang, Pemerintah Indonesia telah membentuk suatu hukum atau aturan untuk melindungi hak-hak perempuan, khususnya perempuan sebagai tenaga kerja, yaitu UU No. 7 Tahun 1984 tentang CEDAW, UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan lainnya. Meski telah ada hukum yang mengatur, masih banyak pekerja perempuan dalam ekonomi

kreatif yang mengalami pelanggaran terhadap hak-hak mereka seperti hanya sebagian kecil perempuan yang mendapat pembekalan khusus untuk meningkatkan kapasitas, kerja seni banyak dilakukan di luar jam kerja umum, angka kekerasan seksual tinggi, dan lainnya. Adapun penyebabnya pelanggaran ini adalah kurangnya jumlah aparat untuk mengawasi sektor ketenagakerjaan. Selain itu, pelanggaran juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepada pekerja perempuan mengenai hak-hak pekerja mereka oleh pemerintah dan perusahaan sehingga apabila hak mereka dilanggar, pekerja perempuan tidak menyadari pelanggaran yang telah dilakukan oleh perusahaan terhadap hak mereka atau bahkan mereka tidak berani untuk berbicara. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa langkah pemberdayaan maupun langkah perubahan sosial jangka panjang masih belum maksimal dan masih harus diupayakan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan partisipasi perempuan dalam ekonomi kreatif menjadi terhambat dalam mewujudkan SDGs di Indonesia. Pertama, adanya konstruksi sosial terhadap gender yang membedakan sifat, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki. Melalui perbedaan ini, laki-laki lebih banyak mendapat keuntungan dibanding perempuan. Kondisi ini sangat menggambarkan struktur patriarki yang menempatkan laki-laki diposisi dominan dan perempuan diposisi subordinat. Adapun bentuk pengaruh patriarki yang menempatkan perempuan diposisi subordinat di sektor ekonomi kreatif, yaitu : (1) sebanyak 60,82% perempuan dalam ekonomi kreatif bekerja dengan kegiatan informal; (2) hanya sedikit perempuan yang menjabat sebagai tenaga profesional dan tenaga kepemimpinan di sektor ekonomi kreatif; (3) adanya kesenjangan upah dimana upah pekerja perempuan lebih rendah dari pekerja laki-laki; dan (4) ruang kerja perempuan terbatas pada subsektor yang sesuai dengan pekerjaan domestik perempuan seperti fesyen, kuliner, dan kriya.

Kedua, belum terpenuhinya kebutuhan praktis dan kepentingan strategis. Untuk kebutuhan praktis, pekerja perempuan memiliki tingkat yang pendidikan yang rendah. yaitu berpendidikan SMP ke bawah lebih banyak dari yang berpendidikan Diploma ke atas. Sedangkan dari sisi pendapatan, perempuan memiliki pendapatan yang sedikit karena tanggung jawab terhadap urusan rumah tangga menyebabkan ruang gerak dan peluang kerja perempuan menjadi terbatas. Sedangkan untuk kepentingan strategis, upaya pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia masih belum maksimal karena belum semua provinsi di Indonesia telah mencapai angka IDG yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan, pemberdayaan perempuan tidak dilakukan sesuai dengan 7 prinsip WEPs, dan terbatasnya waktu perempuan untuk mengikuti program pemberdayaan. Sedangkan untuk pemenuhan perlindungan hukum, hukum tersebut belum sepenuhnya ditegakkan karena kurangnya aparat untuk mengawasi sektor ketenagakerjaan dan kurangnya sosialisasi kepada pekerja perempuan terkait hukum yang melindungi hak-hak mereka sebagai pekerja. Demikian, konstruksi sosial terhadap gender dan belum terpenuhinya kebutuhan praktis dan kepentingan strategis perempuan merupakan faktor yang menyebabkan partisipasi perempuan dalam ekonomi kreatif belum maksimal dalam mewujudkan SDGs yang sesuai dengan target global.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ika Riswanti Putranti, A. Md. Ak., S.H., Ph. D selaku dosen pembimbing I dan Bapak Marten Hanura, S.I.P, M.P.S., selaku dosen pembimbing II. Tidak lupa, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Dra. Rr. Hermeni Susiatiningsih, M.Si selaku dosen penguji 1 yang telah membantu penulis untuk menyempurnakan penelitian ini. Penulis berharap agar Ibu Ika, Bapak Marten, dan Ibu Hermeni selalu dalam keadaan sehat dan segala tanggung jawab yang dimiliki diberi kelancaran.

REFERENSI

- Badan Ekonomi Kreatif, & Badan Pusat Statistik. (2017a). *Tenaga kerja ekonomi kreatif 2011-2016*.
- Badan Ekonomi Kreatif, & Badan Pusat Statistik. (2017b). *Upah tenaga kerja ekonomi kreatif 2011-2016*.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Jumlah dan Distribusi Penduduk*.
<https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>
- Bonnet, F., Vanek, J., & Chen, M. (2019). *Women and Men in the Informal Economy – A Statistical Brief*. www.wiego.org
- CFR. (2021). *Growing Economies Through Gender Parity*.
<https://www.cfr.org/womens-participation-in-global-economy/>
- Claridge, T. (2004). *Designing Social Capital Sensitive Participation Methodologies*.
<https://www.socialcapitalresearch.com/wp-content/uploads/2013/01/Social-Capital-and-Participation-Theories.pdf>
- Hayes, A., & Setyonaluri, D. (2015). *Taking Advantage of The Demographic Dividend in Indonesia: A Brief Introduction to Theory and Practice*.
- Kemenparekraf. (2020a). *Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020*.
- Kemenparekraf. (2020b). *STATISTIK EKONOMI KREATIF 2020*.
www.kemenparekraf.go.id
- Kemenpppa. (2020a). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*.
- Kemenpppa. (2020b). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*.
- Kemenpppa. (2020c). *Profil Perempuan Indonesia 2020*.
- Lemmon, G. T., & Vogelstein, R. (2017). *Building Inclusive Economies*.
<https://www.cfr.org/report/building-inclusive-economies>
- Palulungan, L., Kordi, M. G. H., & Ramli, M. T. (2020). *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*. Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). www.batukarinfo.com
- Parpart, J. L., Connelly, P., & Barriteau, E. (2000). *Theoretical perspectives on gender and development*. International Development Research Centre.
- Rahmadani, M. (2022). *Wawancara*.
- Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., & Fuller, G. (2021). Sustainable Development Report 2021. In *Sustainable Development Report 2020*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108992411>
- Sirclo. (2020). *Dominasi Perempuan dalam Sektor Ekonomi Kreatif Indonesia*. Sirclo.
<https://www.sirclo.com/blog/dominasi-perempuan-dalam-sektor-ekonomi-kreatif-indonesia/>
- Sultana, A. (2010). *Patriarchy and Women's Subordination: A Theoretical Analysis*.

- Susanto, N. (2016). TANTANGAN MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DALAM BUDAYA PATRIARKI. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 7(2). <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/517>
- UN Women. (2021). *Indonesian companies pledge to advance gender equality in businesses at the 2021 Women's Empowerment Principles Awards*. UN Women. <https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2021/10/indonesian-companies-pledge-to-advance-gender-equality-in-businesses-at-the-2021-weeps-awards>
- United Nations. (2021). *Global indicator framework for the Sustainable Development Goals and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development*. <https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/>
- Widoyono, S. B., Rahayu, T. E., Said, A., Santosa, S. D., Ayuni, S., & Budiati, I. (2016). Akses Terhadap Pasar Tenaga Kerja. In *Statistik Gender Tematik Potret Ketimpangan Gender Dalam Ekonomi*.
- World Economic Forum. (2021). *Global Gender Gap Report 2021*. <http://reports.weforum.org/global->